

Judul : Agar Lifting Tak Lagi Kering  
Tanggal : Senin, 24 Agustus 2020  
Surat Kabar : Seputar Indonesia  
Halaman : 6

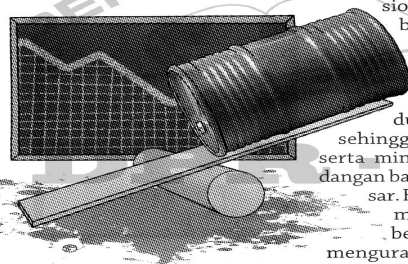
# Agar Lifting Tak Lagi Kering

**JAKARTA** – Pada asumsi makro Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (14/8), *lifting* minyak diproyeksikan 705.000 barel per hari (bph). Angka tersebut turun dibandingkan pada APBN tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai perbandingan, tahun ini *lifting* minyak dipatok 755.000 bph, setahun sebelumnya, yakni pada 2019 sebesar 775.000 bph dan pada 2018 sebesar 800.000 bph.

Melihat tren penurunan *lifting* yang selalu terjadi setiap tahun, tentu ini menjadi *alarm* bagi industri minyak dan gas (migas) nasional. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan industri migas nasional saat ini. Disisi lain, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air diprediksi meningkat sehingga untuk menutupinya harus mengandalkan impor. Tahun lalu, volume impor migas tidak kurang dari 800.000 bph. Angka sebesar itu sebagai imbas dari besarnya konsumsi dalam negeri yang mencapai kisaran 1,5 juta bph.

Meski selama masa pandemi terjadi penurunan konsumsi BBM akibat daya beli melemah dan masih terbatasnya aktivitas ekonomi, namun data *lifting* migas tersebut sebaiknya jangan pernah diabaikan. Dengan konsumsi BBM yang masih tinggi sementara minyak mentah yang siap dijual terus



menurun, hal itu jelas bukan indikator baik bagi APBN. Imbasnya, defisit akibat impor migas dipastikan membengkak.

Merespons penurunan produksi minyak yang selalu terjadi setiap tahun, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebenarnya sudah berupaya melakukan sejumlah langkah mulai dari membuka data dan promosi *open area*, menjaga keekonomian wilayah kerja, efisiensi biaya, dan memaksimalkan *one door service policy* untuk mempercepat perizinan. SKK Migas juga meluncurkan program

menuju produksi minyak satu juta barel yang ditargetkan pada 2030. Terkini, SKK Migas kembali memperbolehkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk memilih opsi *cost recovery*, setelah sebelumnya sempat mewajibkan skema *gross split* alias bagi hasil.

Kembali ke persoalan tren penurunan *lifting* pada APBN, hal itu bisa jadi merupakan respons atas produksi minyak nasional yang terus berkurang dalam beberapa dekade terakhir. Penyebabnya, antara lain sumur-sumur produksi yang sudah tua sehingga tak lagi produktif serta minimnya temuan cadangan baru dalam jumlah besar. Kondisi ini mau tidak mau membuat KKKS berjuang untuk tidak mengurangi laju penurunan produksi dengan mengoptimalkan sumur-sumur yang ada. Beberapa strategi yang dipilih antara lain melakukan *workover* atau *well services* untuk menjaga produksi. Kegiatan-kegiatan tersebut tetap dilakukan kendati dalam keadaan pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. "Memang ada kendala di lapangan, tapi tidak menghalangi untuk terus berproduksi," ujar CEO Pertamina Hulu Energi Budiman Parhusip saat konferensi pers virtual di Jakarta, Sabtu (15/8/20).

Terkait target *lifting* pada RAPBN 2021 yang disampaikan pemerintah, yakni sebanyak 705.000 bph, Budiman

mengungkapkan, Pertamina selalu KKKS melalui anak usahanya akan selalu berupaya optimal untuk mencapai target yang dicantumkan perusahaan dalam mendukung target nasional.

"Ke depan upaya menjaga dan meningkatkan produksi akan terus diperkuat melalui pengeboran sumur, *workover*, perawatan sumur, serta menjaga keandalan fasilitas produksi demi menghindari *unplanned shutdown*," kata Budiman.

Sepanjang tahun ini, ujar dia, Pertamina di sektor hulu tetap berkomitmen melakukan berbagai aktivitas bisnis, seperti melakukan pengeboran eksplorasi sebanyak delapan sumur, eksploitasi 156 sumur, *workover* 320 sumur, dan *well services* 6.699 sumur. Selain itu, Pertamina juga baru saja merampungkan survei Seismik 2D Jambi Merang sepanjang 31.140 km yang merupakan survei terbesar di Asia Tenggara.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, turunnya *lifting* minyak pada APBN yang terjadi saban tahun merupakan hal wajar. "Kenapa dibilang wajar, karena pertama, kondisi lapangan migas kita saat ini sudah *mature* dan *decline rate* yang besar. Tahun ini saja sudah berkisar 4% dan bahkan bisa 20% jika tidak ada kegiatan pengeboran dan kerja sumur secara signifikan," kata Mamit.

Faktor lain, kata dia, tren harga minyak dunia masih rendah dan tidak adanya temuan cadangan dalam skala besar.

□ **yantokusdiantono**